

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Memasuki Semester II Tahun 2026, kondisi inflasi di Kabupaten Murung Raya masih mengacu pada perkembangan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah karena Kabupaten Murung Raya belum termasuk daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pada Juni 2026 inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar **4,47 persen (year-on-year)** dan **0,23 persen (month-to-month)**. Sementara secara nasional inflasi tercatat sebesar **3,34 persen (year-on-year)** dengan inflasi tahun kalender sebesar **1,79 persen**.

Perkembangan harga di Kabupaten Murung Raya relatif stabil, meskipun masih terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, gula konsumsi, dan daging ayam ras. Fluktuasi harga dipengaruhi oleh tingginya biaya distribusi, kondisi cuaca, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Murung Raya meliputi:

- Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi.
- Biaya logistik yang tinggi akibat kondisi geografis dan jarak distribusi.
- Produksi komoditas hortikultura lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
- Fluktuasi harga komoditas pangan akibat perubahan musim dan cuaca.
- Perlunya peningkatan akurasi data stok pangan dan harga sebagai dasar pengambilan kebijakan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi, antara lain:

- Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap minggu.
- Melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin di pasar.
- Berkoordinasi dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha untuk menjaga pasokan pangan.
- Menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar apabila terjadi kenaikan harga komoditas strategis.
- Mendorong pemanfaatan pekarangan pangan, pengembangan hortikultura, dan peningkatan produksi pangan lokal.
- Melaksanakan pengawasan distribusi barang untuk mencegah kelangkaan maupun penimbunan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Semester II Tahun 2026 berjalan cukup

efektif. Ketersediaan bahan pokok secara umum masih terjaga dan koordinasi antarperangkat daerah melalui TPID semakin baik. Pelaksanaan pemantauan harga secara rutin dan tindak lanjut hasil Rakor Inflasi Kemendagri mampu mengantisipasi gejolak harga pada komoditas strategis.

Namun demikian, tantangan utama masih berasal dari tingginya biaya distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta terbatasnya produksi pangan lokal yang menyebabkan harga beberapa komoditas masih berfluktuasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi pada Semester II Tahun 2026, direkomendasikan:

1. Memperkuat pelaksanaan strategi 4K TPID (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
2. Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan komoditas pangan strategis.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar menjelang hari besar keagamaan serta akhir tahun.
4. Meningkatkan produksi pangan lokal melalui dukungan kepada petani dan kelompok tani.
5. Memperkuat pemantauan harga dan stok pangan berbasis data sebagai sistem peringatan dini.
6. Meningkatkan efisiensi distribusi dan pengawasan rantai pasok untuk menekan biaya logistik.